

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBAHAN BIAYA SERVICE
HANDPHONE DI LUAR KESEPAKATAN**

(Studi di Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga,
Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Ida Saputri

NPM : 1621030237

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H / 2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBAHAN BIAYA SERVICE
HANDPHONE DI LUAR KESEPAKATAN**

(Studi di Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga,
Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

IDA SAPUTRI

NPM : 1621030237

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.AG., M.Ag

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Perkembangan media canggih dan modern ditandai dengan keluarnya barang-barang dalam bidang komunikasi contohnya *handphone*, seiring berjalan nya waktu *handphone* sering mengalami kerusakan yang beragam. Maka munculah beragam konter yang menawarkan jasa *service* diantara nya Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Di konter ini terjadi penambahan biaya *service* secara tiba-tiba saat proses *service* dilakukan. Penambahan ini tidak sesuai dengan akad awal dan tambahan biaya tersebut tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana terjadinya praktik penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan biaya *Service Handphone* di luar kesepakatan di konter tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :1) mengetahui bagaimana terjadinya praktik penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan di Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 2) mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya *service handphone* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sifat penelitian adalah deskriptif, sumber datanya langsung didapat dari pemilik, pekerja, konsumen dan dengan bantuan buku-buku yang berkaitan dengan judul. sampelnya adalah pemilik, karyawan dan para konsumen di Irama Cell yang dijadikan responden. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekontruksi data, sistematika data. Analisa data menggunakan analisis kualitatif dengan pemdekatan berfikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik upah mengupah yang terjadi di Irama Cell terdapat unsur penipuan dari pihak konter dan tidak terdapatnya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. sebelum dilakukannya *service* terjadi proses pengecekan kerusakan terlebih dahulu namun saat proses pengambilan terdapat tambahan biaya dengan alasan kerusakan yang tidak ada. Dan apabila dilihat dari Tinjauan Hukum Islam tentang penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan awal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu salah satu pihak mengalami kerugian karena menguntungkan satu pihak yang lain, hal ini sama saja disebut *riba* dan terdapatnya unsur penipuan (*tadlis*) yang dilakukan oleh pihak konter. Unsur penipuan dalam kesepakatan ini dilarang dan haram hukum nya dalam Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Saputri
NPM : 1621030237
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Service Handphone Diluar Kesepakatan (Studi di Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 April 2020
Penulis



Ida Saputri
NPM. 1621030237

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : "dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah (2) :188)



PERSEMBAHAN

Sembah dan sujudku kepada pemilik kehidupan dan alam semesta Allah SWT. Tuhan seluruh Alam, Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai.

1. Kedua orang tua saya Bapak M.Aliyan dan Ibu Bahunya yang telah sabar membesarkan, membiayai, dan mendoakan setiap langkah saya, saya sadari apapun yang saya lakukan takkan sepadan dengan segala pengorbanan kalian. Tapi saya berharap saya selalu bisa mengukir senyum diwajah kalian termasuk saat saya memakai Toga, Kalian adalah segalanya yang saya punya dimuka bumi ini. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aaamiiin.
2. Kakak tercinta Yudi Saputra, Arsandi, Gustami dan ayuk tercinta Diana dan Dianti yang telah memberikan saya semangat dan dukungan moril maupun materil, semoga Allah SWT senantiasa memperlancar segala urusan.
3. Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dan kepada dosen-dosen yang telah memberikan pendidikan terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ida Saputri. Dilahirkan pada tanggal 05 April 1998 di Kotabumi, Lampung Utara. Penulis adalah putri ke-6 dari 6 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak M.Aliyan dan Ibu Bahuna, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Dasar (SD) di SD Negeri 4 Gapura, lulus Tahun 2010.
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kotabumi, lulus Tahun 2013.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Kotabumi, lulus Tahun 2016.
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau lah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak. aamiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Service Handphone Di luar Kesepakatan (Studi di Irama Cell Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikan nya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung

2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, dari sosok beliau-lah saya belajar untuk selalu ceria dan semangat.
3. Khoiruddin, M.S.I Sebagai ketua Program Studi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.
6. Segenap staff perpustakaan Syari'ah dan Hukum maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Muamalah-E 2016 yang telah mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
8. Keluarga KKN 007 Desa Tanjung Wangi tahun 2019 yang selalu memberi dukungan, semua kenangan yang dilalui selama 40 hari takkan pernah terlupakan. beserta jajaran pemerintah desa Tanjung Wangi yang selalu memberikan doa dan tidak terputus komunikasinya hingga detik ini.

9. Sahabat tercinta WKWK *Squad* (Henisa, Jihan Ayu, Rani Afrinah, Tanti Aulia) yang telah memberikan warna yang indah di masa perkuliahan, menemani dalam suka dan duka, serta terimakasih atas segala dukungan, motifasi, serta doa, semoga diperlancarkan karirnya. *See you on top guys.*
10. Sepupu tercinta Nova Yanse, Juliwan, Bangkit Sanjaya, yang telah memberi semangat.
11. Teman rasa saudara Melia Aryati dan Merlin Fadhilah yang bersedia mendengar keluh kesah dan mengajarkan kedewasaan.
12. Kakak tercinta Yulisa Safitri, S.H., yang telah memberi pengarahan dan dukungan. Semoga dilancarkan segala urusannya.

Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penulis kalangan akademisi serta masyarakat umum.

Bandar Lampung, 2020
Penulis

Ida Saputri
NPM. 1621030237

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Akad <i>Ijarah</i>	17
a. Pengertian akad <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah).....	17
b. Dasar hukum <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah)	21
c. Rukun dan syarat <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah)	25
d. Bentuk-bentuk <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah).....	31
e. Ketentuan hukum dalam praktik <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah).....	33
f. Berakhirnya <i>Ijarah</i> (Upah-mengupah).....	37
g. Pembayaran jasa terhadap pekerja diluar kesepakatan	38
2. Upah (<i>Ujrah</i>).....	40
a. Pengertian upah (<i>ujrah</i>).....	40
b. Dasar Hukum upah (<i>ujrah</i>)	42
c. Bentuk-bentuk dan Syarat upah (<i>ujrah</i>).....	45
d. Pembayaran upah (<i>ujrah</i>).....	47
e. Penentuan tarif upah (<i>ujrah</i>)	49
f. Perbedaan tingkat upah (<i>ujrah</i>).....	49
B. Tinjauan Pustaka	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Irama Cell Jl. H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung	55
1. Sejarah Berdirinya	55
2. Visi dan Misi.....	56
3. Struktur	56
4. Desskripsi tugas	58
5. Ketentuan <i>service</i>	59
B. Pelaksanaan servis dengan Penambahan Biaya Di luar Kesepakatan awal di Irama Cell.....	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penambahan Biaya Service Handphone Di luar Kesepakatan di Irama Cell Jl. H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Service Handphone Di luar Kesepakatan di Irama Cell Jl. H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBAHAN BIAYA SERVICE HANDPHONE DI LUAR KESEPAKATAN** (Studi di Irama Cell Jl. H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung).

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia. Sedangkan pengertian menurut ahli fiqh adalah “koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat. Maka hukum Islam dalam penelitian diartikan sebagai kumpulan peraturan dalam agama islam baik peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. atau sunnah rasul atau ijtihad para Ulama”.²
3. Biaya *Service* adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) atau bisa disebut ongkos,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Hasbi Ash-shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 1975), h. 44.

belanja, pengeluaran untuk *service* atau perbaikan. Pengertian dari perbaikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula.³

4. *Handphone* adalah alat komunikasi tanpa kabel yang sering disebut dengan telepon genggam. Karena jenis telepon ini sengaja dirancang untuk kemudahan pemakaian yang dapat menunjang mobilitasnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dalam Skripsi ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam mengenai **PENAMBAHAN BIAYA SERVICE HANDPHONE DI LUAR KESEPAKATAN** (Studi di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

1. Alasan Objektif

Secara Objektif, terdapat penambahan biaya *service handphone* yang terjadi di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan

³ Arif, *Farmasetika*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h.39.

⁴ Misky, *Kamus Informasi dan Teknologi*, (Jakarta: EDSA Mahkota, 2005), h.67.

Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung. penambahan biaya ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam kesepakatan, oleh karenanya saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut.

2. Alasan Subjektif

- a. Tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan menarik untuk dibahas, juga terdapat sarana yang mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur yang menunjang seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian data dalam usaha menyelesaikan laporan proposal ini maka sangat memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.
- b. Pembahasan mengenai penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan ini masih belum ada di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun diakhirat (*al-falah*).⁵ Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar, tidak hanya terbatas dalam hubungan pribadi antara seorang manusia dengan penciptanya (*hablum minallah*). namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minanas*) termasuk juga dengan alam sekitarnya.⁶

Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*), menyayangi (*mawadah*), dan persaudaraan (*ikha'*). Hal ini seperti firman Allah SWT :



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁸

⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta:Kencana,2007),h.3.

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2009),h.2.

⁷ Qs. Al-Maidah (5) : 2

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an,1986), h.157

Dalam Islam, upah dikenal dengan *ujrah*. Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainnya, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah *Al-ijarah*. Oleh karena itu untuk dalam melakukan akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam *ijarah* itu sendiri.⁹ Dalam akad *ijarah* kedua belah pihak harus saling sepakat satu sama lain. *Ijarah* seperti sebuah akad yang kedua belah pihak wajib memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Hal ini seperti firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١٠

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹¹

Saat ini perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah dengan

⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press,(Bogor:Al-Azhar Press,2010),h.110

¹⁰ Qs.Al-Maidah (5) :1

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Diponogoro, 2014), h.59

berkembangnya media canggih dan moden, seperti keluarnya barang-barang yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi.¹² salah satunya adalah *handphone*, *Handphone* merupakan salah satu dari produk kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia.

Seiring berjalannya waktu *handphone* sering mengalami kendala dalam hal penggunaanya, kendala ini sering kali mengakibatkan *handphone* mengalami kerusakan yang beragam. Oleh karena nya sekarang banyak sekali konter *handphone* yang menawarkan jasa untuk memperbaiki kerusakan mesin pada *handphone*. Seperti yang terjadi di Jl.H.Agus Salim Tj. Karang pusat terdapat konter yang memberikan jasa *service handphone* yang mengalami kerusakan, Biaya yang dikeluarkan untuk *service handphone* pun beragam sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada *handphone* tersebut.

Karena kerusakan yang beragam ini membuat konter-konter tempat *service handphone* memasang tarif yang kadang tidak sesuai dengan kerusakan *handphone* tersebut dan sering pula terjadi kerusakan saat proses *service* yang tiba-tiba sehingga terjadi penambahan biaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contoh nya si pelanggan A menservis *handpone* nya di sebuah konter, kemudian konter tersebut menjelaskan kerusakan dan menetapkan biaya nya. kemudian pelanggan setuju dengan biaya tersebut. Tetapi, ketika pelanggan mengambil *handphone* tersebut terjadi penambahan biaya secara tiba-tiba. Pemilik konter berdalih *handphone* tersebut mengalami

¹² Narudin, *perkembangan teknologi komunikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2017),h.23.

kerusakan lain. jadi sebagai pelanggan mau tidak mau tetap harus membayar biaya tersebut padahal jelas dari awal kerusakan tersebut tidak ada.

Upah seharusnya diberikan sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan. Apabila ada ketidaksesuaian tentu akan merugikan salah satu pihak. Seperti firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁴

Penambahan biaya *service* secara tiba-tiba yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal ini tentu menimbulkan kerugian dari pihak konsumen konter *handphone* tersebut.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas bagaimana kacamata hukum Islam menanggapi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan nya.

¹³ Qs.Al-Baqarah (2) :188

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Diponogoro, 2014),

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Penambahan Biaya *Service Handphone* Di luar Kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
2. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Penambahan Biaya *Service Handphone* Di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Penambahan biaya *Service Handphone* di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam tentang penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan yang diharapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat di Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung tentang penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Muamalah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka di butuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field resarch*).Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah

kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang terjadinya penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁶ Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁷ Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam

¹⁵ Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta :Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

¹⁶ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma, 2015),h.58.

¹⁷ Marzuki, *Metodelogi Riset*, BPFE-VII, cet 4, (Yogyakarta:Persada, 1997),h.55.

penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemilik, pekerja dan konsumen di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang berfungsi menjadi mendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan penambahan biaya *service handphone* di luar kesepakatan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian adalah 1 pemilik konter, 3 karyawan yang bekerja di konter, serta kurang lebih 106 orang konsumen konter tersebut dalam jangka waktu sebulan. Jadi, populasi dalam penelitian berjumlah 110 orang, yang terdiri dari pemilik, karyawan serta konsumen.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.102.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁹ Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 orang, maka dapat diambil 10% nya yaitu berarti sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yakni 1 pemilik konter, 3 karyawan, dan 7 orang konsumen.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.²⁰ Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-

¹⁹ *Ibid*, h.108.

²⁰ Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006), h.72.

pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari pemilik konter dan konsumen di Irama Cell. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik penambahan biaya *service handphone* di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung menjadi objek penelitian. metode wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang sedang diteliti kepada pemilik konter Irama Cell.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²¹ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau Digambar. Dalam

²¹ *Ibid*,h.73.

penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa terjadinya penambahan biaya *service* di konter Irama Cell.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²² Dokumentasi ini dilakukan di Irama Cell Jl H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

6. Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian di atas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi data (*rekontruicing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³

²² Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.69

²³ Amirullah, Zainal Abidin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif adalah metode Analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad *Ijarah* (Upah-mengupah)

a. Pengertian akad *ijarah* (Upah-mengupah)

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *wa'ad* (*al-wa'du*), akad (*al-'aqdu*), *'ahd* (*'al-ahdu*), dan *iltizam* dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda.²⁴ lafal akad berasal dari lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.²⁵

Dalam terminologi hukum Islam akad mendefinisikan sebagai berikut : 'akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya'. Yang dimaksud dengan ijab adalah definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau

²⁴ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), h.1

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Medika Pratama,2014), h.97

ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima dan meyetujui pernyataan ijab.²⁶

Secara etimologi (bahasa) aqad mempunyai beberapa arti, antara lain :

- 1) Mengikat (*ar-aabthu*), yaitu : mengumpulkan dua ujung tali atau mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian menjadi sepotong benda.
- 2) Sambungan (*aqdatun*), yaitu : sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu mengikatnya.
- 3) Janji (*al-ahdlu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ ٢٧

Artinya : Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.²⁸

Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 1 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ ۖ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا

يُرِيدُ ۝ ٢٩

Artinya : hai orang-orang beriman penuhi aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.

²⁶ Gufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual. Ed 1, Cet 1*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h.76

²⁷ Qs.Ali-Imran (3) : 76

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT Diponogoro,2014), h.59

²⁹ Qs.Al-maidah (5) : 1

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.³⁰

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri.³¹ Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang yang lainya secara syara pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.³²

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.³³ menurut *syara' ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia. *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.³⁴

Ada beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama :

1) Ulama Hanafiyah:

Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemikiran manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

³⁰ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT Diponogoro,2014), h.82

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2014),h.43

³² *Ibid*,h.44

³³ Hendi suhendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),h.113.

³⁴ Nurul huda, *Ekonomi Makro Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press, (Bogor:Al-Azhar Press,2010),h.105.

2) Sayyid Sabiq:

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan pengantiaan.³⁵

3) Ulama Asy-Syaffiyah:

Al-ijarah adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

'Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atas kelebihan dengan pengganti tertentu'.

4) Ulama Hanabillah:

Al-ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*.

5) Ali al-khaff

Al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

6) Idris Ahmad

Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

³⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*...,h.57

7) Saleh Al-fauzan

berpendapat bahwa *ijarah* dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Secara umum *ijarah* didefinisikan sebagai akad atau manfaat yang diperbolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.³⁶

b. Dasar hukum akad *ijarah* (Upah-mengupah)

Melihat uraian di atas, rasanya mustahil apabila manusia bias hidup berkecukupan tanpa hidup ber-*ijarah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya akad *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan. serta salah satu bentuk tolong menolong yang dijamin oleh Islam. Akad *Ijarah* merupakan salah satu bentuk jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa akad *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.³⁷

³⁶ Saleh fauzan, *Fikih sehari-hari*, cet ke-1, (Jakarta:Gema Insani Press,2005),h.482.

³⁷ Helmi karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997),h.30.

Dasar hukum akad *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma'.

1) Al-Qur'an

a) Terdapat dalam Al-Qur'an Surat at-Talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “Kemudian jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan”.³⁸

b) Terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

³⁸ Qs.Ath-Thalaaq (65) : 6

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surakarta:Media Insani Publishing,2007),h.559.

⁴⁰ Qs.Al-Baqarah (2) : 233

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁴¹.

c) Terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Qashas 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَجِرُّهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾⁴²

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”⁴³.

2) Hadist

a) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَعْطُوا الْاَجْرَ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ...⁴⁴ (رواه...)

“Berikanlah oleh mu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (HR.Ibnu Majah).

b) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas:

اِخْتِمْ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ اَجْرَهُ...⁴⁵ (رواه...)

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhari dan Muslim).

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta:Media Insani Publishing,2007),h.37

⁴² Qs.Al-Qashas (28) : 26

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta:Media Insani Publishing,2007),h.250

⁴⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikri,1415), h.20

⁴⁵ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, juz II ,t.th), ,h.860

dua hadist tersebut menegaskan tentang praktek upah mengupah kepada seseorang yang berkerja kepada orang lain. Hadist pertama menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang diperkerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan. Hal ini sekaligus mendapat konfirmasi pada hadist kedua yang mendeskripsikan bahwa Rasulullah SAW mempraktekan akad ini. Atas beberapa hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang diakui keberdaanya oleh hukum Islam.

3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa akad *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seseorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini.⁴⁶ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemsalahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan akad *ijarah*.

Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum akad *ijarah* dalam hal upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h.117

c. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah-mengupah)

1) Rukun *ijarah*

Secara etimologi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴⁷ Menurut hanafiyah, rukun dan syarat hanya ada satu, , yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu :

a) *Muta'aqiadin* (dua pihak yang bertransaksi).⁴⁸

Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka akad menjadi tidak sah.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), H. 966

⁴⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004), h. 317.

b) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sighat adalah transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqiadin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakini nya, seperti lafal mengupah seseorang. Upah mengupah ini berarti *ijarah* kemudian orang yang diupah menyetujuinya.

Jika *Muta'aqiadin* mengerti lafal *sighat*, maka *ijarah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syari' tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.⁴⁹

c) *Al-ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan dalam *ijarah*. Seperti dirham, barang-barang yang dukur dan ditimbang, dan barang-barang yang dapat dhitug. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukuranya.

d) *Ma'qūd'alaih* (manfaat yang ditransaksikan). Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, h.316

⁵⁰ *Ibid*,h.170

2) Syarat *ijarah*

Syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilakukan dan harus diindahkan. Menurut Satria Effendi M.Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.⁵¹

Syarat *ijarah* terdiri dari 4 (empat), sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, syarat *lazim*.

a) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hnafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak isyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.⁵²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah*, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridaan walinya.

⁵¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.34

⁵² Allaudin al-kasanih. *badai' ash-Shanas fi taribAsy-syarai*, juz VI, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), h.176

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan Mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.⁵³

b) Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

c) Syarat Sah *Ijarah* (Upah-mengupah)

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *mu'qud' allaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu :

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad)

a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا بَيْنَكُمْ ۝٢٩

⁵³ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaz*, juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-
'Arabi, 1971), h. 332

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁴

- b. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. *Ma'qud 'allaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan jelas manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atas jasa seseorang ketika transaksi dilakukan.
- d. *Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi Syara'. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, sebab diharamkan syara'.
- e. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'. Para ulama sepakat melarang

⁵⁴ Qs.An-Nisa' (4) : 29

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an,1986), h.132.

ijarah baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat ataupun berbuat dosa. Tidak mengupah untuk pekerjaan yang tidak diwajibkan kepadanya.

2. *Ma'aqud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad). Syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

3. *Ujrah* (upah)

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah* seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

4. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

5. Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas : *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) terhindar dari cacat dan Tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang melakukan akad.⁵⁶

⁵⁶ Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta:Pustaka Setia,2000),h.126-129.

d. Bentuk-bentuk *ijarah* (Upah-mengupah)

Menurut objeknya, *ijarah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti tukang *service*, tukang jahit, buruh pabrik, *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang *service*, buruh pabrik dan tukang jahit.⁵⁷

Pada *ijarah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ijarah* benda terdapat hukum jual beli. Terdapat beberapa jenis *ijarah*, antara

⁵⁷ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*,h.236

lain *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain/ijarah muthalaqah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, dan *ijarah multijasa*.

1) *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'Amal digunakan dalam memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

2) *Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah (Ijarah murni)*

Ijarah 'Ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanyalah *manfaah (usufruct)*. *Ijarah 'ain* dalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* disebut dengan *ujrah*. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang.

3) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, yang dimaksud *ijarah*

muntahiya bittamlik adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah)pada saat tertentu sesuai akad.

4) *Ijarah* Multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁵⁸

e. **Ketentuan Hukum dalam praktik *ijarah* (Upah-mengupah)**

1) Pembayaran upah atau sewa

Sebelumnya pernah disinggung bahwa pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* harus sesuatu yang bernilai , baik itu berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁵⁹

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak isyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhan nya,

⁵⁸ Adi Warman Karin, *Bank Islam:Analisa Fiqh dan keuangan*, (Jakarta,IIIT,2002),h.53-54

⁵⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,...h.36

menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

2) Hak atas upah

Ajir khass berhak atas upah yang telah ditentukan apabila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam waktu berlakunya perjanjian itu, meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa *ajir khass* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Apabila *musta'jir* tidak memerlukan lagi tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian itu, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajir khass*, kecuali apabila pada diri *ajir* terdapat halangan yang memungkinkan untuk berkerja sesuai dengan isi perjanjian.⁶⁰

3) Konsep upah dalam Islam

Tenaga kerja dan upahnya tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dan keduanya harus berkesinambungan. Berikut beberapa konsep upah dalam Islam yaitu:

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h.33-34

a) Keadilan

Dalam sistem ekonomi Islam penetapan upah didasarkan pada kejujuran dan rasa keadilan pada buruh dan majikan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap buruh dan juga tidak merugikan kepentingan majikan. Penganiayaan yang dimaksud adalah mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah melebihi kemampuan mereka.⁶¹

b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

Islam memandang upah tidak hanya sebatas imbalan yang diberikan kepada perkerjaan melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada nilai kemanusiaan. Transaksi *ijarah* diberlakukan kepada seorang *ajir* (perkerja) atas jasa yang telah mereka lakukan. Sedangkan upahnya ditakar berdasarkan pada jasanya.

c) Hak menahan barang untuk minta upah dipenuhi

Ajir berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah perkerjaanya dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan barang mengalami kerusakan, *ajir*

⁶¹ *Ibid*,h.362-365

tidak dibebani mengganti kerugian. Karena kesalahannya sebenarnya terletak pada keterlambatan *musta'jir* memberikan upah setelah perkerjaan selesai.

Tetapi bila ada dalam perjanjian tersebut syarat pembayaran upah ditangguhkan. *Ajir* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan. Dengan akibat bila menahannya juga, apabila tiba-tiba terjadi kerusakan pada bahan yang ditahan itu, ia dapat dituntut untuk membayar kerugian atas kerusakan yang dimaksud.⁶²

d) Keterangan waktu berlakunya perjanjian

Apabila perjanjian kerja tertuju pada *ajir khass*, lama waktu berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila waktu yang diterangkan, dengan akibat bila waktu yang diterangkan, perjanjian dipandang rusak, sebab faktor waktu perjanjian tersebut menjadi ukuran besar jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Berbeda dengan perjanjian kerja yang ditujukan kepada *ajir musytarak*, menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang

⁶² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 161

dinikmati bila itu memang harus melalui waktu yang panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju pada *ajir musytarak* pada umumnya hanya untuk mengira selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecil upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *ajir* berhak penuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.⁶³

f. Berakhirnya *ijarah* (Upah-mengupah)

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang telah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad sudah berakhir.

Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh ulama fiqh.

⁶³ *Ibid*,h.34-36

- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* itu. Menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁶⁴

g. Pembayaran jasa terhadap pekerja di luar kesepakatan

Akad melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak adalah melakukan pekerjaan. *Ijarah* dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban objeknya adalah manfaat dan jasa yang didalamnya tidak boleh adanya unsur-unsur yang dapat merusak kontrak tersebut yaitu :

⁶⁴ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, ... h.238

1) Keterpaksaan

Bila ada keterpaksaan dari salah satu pihak tentu saja ini sama saja dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil dan melukai salah satu pihak.

2) Adanya unsur penipuan, penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan informasi secara palsu dan tidak memberikan keterangan secara jelas.

3) Penyamaran cacat objek, penyamaran ini dimaksudkan agar salah satu pihak tidak mengetahui salah satu kekurangan dari objek tersebut.

4) Tidak adanya keseimbangan objek dan harga.⁶⁵

Dalam hubungan interaksi antar sesama manusia, haruslah berjalan dengan baik yang tunduk kepada syari'ah Islam atau yang keluar dari ketentuan kepadanya yang tidak terbatas.

Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain⁶⁶ :

- 1) Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang diharamkan dan dilarang dalam Islam.
- 2) Adanya unsur riba dalam transaksi tersebut.
- 3) Adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*).
- 4) Adanya unsur penipuan, kecurangan.

⁶⁵ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010), h.324

⁶⁶ *Ibid*,h.325

Dalam sebuah transaksi haruslah memperhatikan keseimbangan keadilan dari semua pihak. oleh karena itu dalam melakukan transaksi harus ada keridaan yang jelas dan tidak boleh menyembunyikan apapun kekurangan objek dalam transaksi tersebut. Suatu transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) *tadlis* dalam Islam disebut juga penipuan atau khianat, seseorang yang dikatakan telah melakukan *tadlis* adalah dengan tidak menerangkan secara jelas objek barang tersebut. karena tidak adanya kepastian dan transparansi, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah dan kekurangan dari objek akad tersebut sehingga dalam transaksi dilarang adanya unsur *tadlis* karena tentu saja dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁷

Apabila para pihak akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat dan upah yang diberikan atau diterima tidak sesuai kesepakatan awal dan terdapat unsur *tadlis* dalam pembayaran jasanya tentu saja ini bukan lah *ijarah* yang sesuai dengan rukun dan syarat *ijrah* tersebut.

2. Upah (*ujrah*)

a. Pengertian upah (*ujrah*)

Ujrah menurut bahasa berarti ‘upah’ atau ‘ganti’ atau ‘imbalan’ , dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang

⁶⁷ Taufiq, "*Tadlis Merusak Prinsip 'Antardhin' Dalam Transaksi*", Jurnal Imiah Syari'ah, Vol. 15, h.3. (On-Line). Tersedia di <http://www.neliti.com/id/publications/929667/tadlis-merusak-prinsip-anthardin-dalam-transaksi> (Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 07.00 WIB)

meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.⁶⁸

Dalam bahasa Arab, upah itu disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi upah atau hadiah atas suatu pekerjaan. Dari segi bahasa *al-ajru* berarti *'iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti. Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti perbuatan.⁶⁹

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.⁷⁰

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima tenaga kerja baik berupa uang dan barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁷¹

Menurut Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.⁷²

⁶⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,h.29

⁶⁹ *Ibid*,h.30

⁷⁰ Karir muzaki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Didesa Klesem Pacitan*,Jurnal *Al- 'Adalah*, vol.14,h.484. (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909/2392> (Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 07.00 WIB)

⁷¹ Zainal Asikin,*Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.68

⁷² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1995),h.361

Wahbah Zuaili dalam buku karangan yang berjudul 'Fiqih Iman Syafi'I' menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas :

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang.⁷³

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *ijarah*. Secara bahasa *ijarah* dan *ujrah* mempunyai makna upah, sewa jasa, atau imbalan.⁷⁴

Konsep upah muncul dalam kontral *ijarah*, yaitu pemiikiran jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrakkan tenaga nya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan inilah yang disebut *al-ujrah* atau upah.⁷⁵

b. Dasar hukum Upah (*ujrah*)

- 1) Dasar hukum dalam Al-Qur'an

- a) Surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatullah*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011) h.180

⁷⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT Hidakarya Agung,1989),h.34

⁷⁵ Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*,...h.115

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسُتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

Artinya : “Tempat kan lah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukannya”.⁷⁷

b) Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷⁹

⁷⁶ Qs.Ath-Thalaaq (65) : 6

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Surakarta:Media Insani Publishing,2007),h.559.

⁷⁸ Qs.Al-Baqarah (2) : 233

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Surakarta:Media Insani Publishing, 2007), h.67

2) Dasar hukum dalam hadist Nabi SAW

a) Hadist tentang menggembala kambing dengan upah Qarith

Dari abu Hurairah r.a bahwa rasulullah SAW bersabda :

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ. نَعَمْ كُنْتُ
أَرْعَا حَا عَلَى قَرَارٍ يَطْلُ لَأَحْلِ مَكَّةَ..⁸⁰ (رواه...)

Artinya : "Tidak lah Allah mengutus seseorang Nabi kecuali menggembala kambing". Para sahabat bertanya , “dan engkau juga?” beliau menjawab, “iya, dulu aku menggembala kambing milik penduduk mekkah dengan upah Qarith." (HR Bukhari)

b) Hadist tentang membayar upah tukang bekam

لَا حَنْجِمَ وَلَا آعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ...⁸¹ (رواه...)

Artinya: "Dari Annas bin Malik, ia berkata, "Nabi SAW pernah berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada si pembekam". (HR Bukhari)

c) Hadist tentang keharusan membayar upah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ...⁸² (رواه...)

⁸⁰ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, juz II ,t.th),h.860

⁸¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut : Dar al-Fikr,t.th), h.165

⁸² Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz II,t.th), h.817

Artinya: "berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". (HR.Ibnu Majah)

c. Bentuk-bentuk dan syarat upah

1) Bentuk upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yaitu seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.⁸³ maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk uang maka barang tersebut diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut dapat dijual. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak cacat.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Upah (*ajrun*) *musamma* yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.

⁸³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,2002), h.103

- b) Upah (*ajrun*) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaan saja.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan upah (*ajrun*) *musamma* dan upah (*ajrun*) *misl'* yang terpenting ada;ah jika seseorang memberi pekerjaan maka harus ada kesepakatan dari awal melakukan perjanjian yang jelas ada kerelaan antara pemberi kerja dengan yang menerima upah dan menetapkan upahnya untuk diberikan. Selain itu upah yang diberikan juga harus sepadan dengan pekerjaan yang diberikan.

2) Syarat-syarat Upah

Adapun syarat-syarat upah Taqiyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).

⁸⁴ *Ibid.*,h.104

- d) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi atau ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan dan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga yang dimaksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, dan sejenisnya..
- f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk maka tidak boleh diberikan yang sudah basi dan tidak sedap.⁸⁵

d. Pembayaran Upah (*ujrah*)

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dalam semua usaha mereka, sehingga tidak terjadi kegiatan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Penganiaya terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka yang tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa

⁸⁵ *Ibid.*,h.105

oleh kekuatan industri untuk membayar upah pekerja melebihi kemampuan mereka.⁸⁶

Ada beberapa pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain :

- 1) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan cara terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapih, dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas yang didapat dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja sama upahnya dengan orang yang malas bekerja.
- 2) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari system ini adalah buruh yang rajin akan mendapat upah yang lebih banyak dibanding buruh yang malas sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
- 3) Upah premi adalah upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.⁸⁷

⁸⁶ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*,h.127

⁸⁷ Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011),h.170

e. Penentuan tarif upah (*Ujrah*)

Menurut Ibnu Tamiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa.⁸⁸ Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Tamiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-a'mal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjualan jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.⁸⁹

f. Perbedaan tingkat upah (*Ujrah*)

Perbedaan tingkat upah dapat dilihat antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Ada beberapa faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu⁹⁰ :

⁸⁸ R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.175

⁸⁹ *Ibid.*, h.176

⁹⁰ Payaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 1998), h.38

1. Perbedaan jenis pekerjaan
2. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan
3. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan
4. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah diantara tingkat pekerja. Upah akan mengalami perbedaan dengan perbedaan nilai jasanya bukan perbedaan jerih payah tenaganya, meskipun jasa dalam suatu pekerjaan itu semata merupakan hasil dari tenaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu :



Artinya : dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁹²

⁹¹ Qs. An-Nissa (4) : 32

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surakarta:Media Insani Publishing, 2007), h.132

Berdasarkan ayat tersebut bahwa penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan dan profesionalisme dan pendekatan Al-Qur'an dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.⁹³

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Pendapat Ibnu Tamiyah bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci, pemikiranya menghubungkan antara tingkat upah yang setara sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian tentang upah antara kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁹⁴

h.118 ⁹³ M.A Manan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2000),

⁹⁴ *Ibid.*,h.120

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Achmad Rizal Mustofa yang berjudul “Perjanjian jual beli barang dengan pembayaran ditunda ditinjau dengan hukum perdata dan hukum Islam” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli barang yang pembayarannya ditunda dan saat pembayaran terdapat kenaikan harga. Sedangkan dalam metode penelitian adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dilakukan oleh pembeli menggunakan bayaran yang ditunda dengan kesepakatan dengan penjual. Kesepakatan ini sama-sama disetujui oleh penjual dan pembeli. Mengenai kenaikan harga yang diberikan oleh pihak pembeli ke penjual seharusnya tidak ada karena tidak dicantumkan. Kesepakatan yang awal hanya menyepakati harga barang pada waktu itu dan pembayarannya sesuai kesepakatan. Tambahan harga ini termasuk dalam riba *nasi'ah* sehingga pembeli tidak wajib untuk menyerahkan harga tambahan.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Wiken Widya Ningrum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual Upah jasa yang

tanpa ada akad di awal nya. Sedangkan dalam metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, interview.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran upah yang terjadi di Toko Rava Komputer merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan yang sudah menjadi hal biasa atau lumrah secara terus menerus sehingga dalam praktek salah satu pihak tidak mengetahui upah yang dikenakan. Dalam hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Islam, pemberian upah pemeriksaan barang rusak ini yang diberlakukan pihak toko adalah akad yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam yang menyebabkan adanya *riba* dan *gharar*. Begitu pula dengan pendapat konsumen yang sebagian menganggap hal ini memang sudah lumrah dikalangan teknologi tetapi alangkah baiknya jika penarikan upah diberitahukan pada saat awal kontrak sebab konsumen merasa haknya dipergunakan dan merasa tidak adanya keterpaksaan yang dialami oleh konsumen.

3. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Kurniawati Safitri yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa service mobil”. Metode yang digunakan adalah survey yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan sudah sesuai dengan hukum islam. Praktik akad yang terjadi di

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah, Pancasila, *Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenada media Grub, 2015.
- Ab Subarsono, *Analisa Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2005.
- Abdul Kadir Mahammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1993.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006.
- Ahmat Zaki Yaman, *Syariah Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini, Terjemahan Mahyuddin Syaf*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Al munawar, Said Agil Husni, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PT Penamadani, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 1*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu 1997.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis Dan Tehnik Pembuatanya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997.
- Asri Wijaya, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grapika, 2010.
- Asri Wijayanti, *Hukum Kenetenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Peroses*, Yogyakarta: Media Presindo, 2007.
- Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Press, 2005.

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Darmawan Prinst, *Hukum Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2000.

Depertertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke IV*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Didi Zasmi Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992.

Duun Wiliam N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2003.

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Endang Soetari, *Ulum Al-Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

H.A. Djazuli, *Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2003.

Halimatusa'diah, *Teori dan Perspektif dalam Penelitian Ilmu komunikasi*, Jakarta: Akom BSI, 2014.

Hendra Murniawan, *Administrasi Pablik*, Bandung: PT Adi Repika Aditama, 2008.

Herlambang, Wiratraman.P, *Peraturan Presiden Istilah, Wewenang, Materi dan Penyusunannya*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

Hesel Nogi S Dan Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta: Ypapi Dan Lukman Offset, 2003.

Howard C G , Mumer, *Law; Its Nature And Limits, New Jersey, Prentice Hall*, Terjemahan Soetanyo Wignjosoebroto, Surabaya: Unair, 1965.

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994.

Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Irfan Islami, *Prinsip-Prinsipkebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cat Ke VII*, Bandung: Bandar maju, 1996.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, Bandung: Creative Media Corp, 2014.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2015.

M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003.

M.Solly Lubis, *Landan Dan Tehnik Perundang-Undangan*, Bandung, Alumi, 1983.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mirriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Muhammad Iqbal, *Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktron Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.

Payamanan J Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Pakultas Ekonomi Indonesia, 1985.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formalasi, Implementasi Dan Evaluasi*, jakarta: PT gramedia, 2004.

Ronyb Haninjo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Makalah Di Sampaikan Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, semarang: fakultas hukum undip, 1999

Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004.

Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Situasi Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, 2006.

Soejano Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sony Simarson, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerja Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramitha, 2002.

Suharno, *dasar-dasar kebijakan publik: kajian proses dan analisis kebijakan*, Yogyakarta: penerbit ombak, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar, Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung : LP2M IAIN RADEN INTAN.

Syarif. *Pedoman Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Peraturan- Peraturan*, Jakarta: Sinar Grafindo. 1996.

Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan, Bandung, Citra Umbara, 2016.

Utrect dan Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta PT Ichtiar Baru, Anggota IKAPI, 1982.

W.J.S. Poewodarminta, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dapertemen P dan K Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

William N.Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum Dan Politik*, Jakarta: Eresco, 1981.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zaeni Asyhaddie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal

<http://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>, diakses pada tanggal 19 September 2016, Pukul 11.05 WIB

<https://e-journal.unair.ac.id/jd/artice/view/14378>, diakses pada tanggal 2 bulan maret 2019.

